

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pelaksanaan desentralisasi antara pusat dan daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 menjelaskan Peran Legislatif semakin terpisah dari Eksekutif, yaitu kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada presiden. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemerintah daerah dapat diawasi oleh masyarakat melalui DPRD. Hal ini memberikan peluang terbesar pemerintah daerah yaitu peluang untuk menunjukkan kemampuan mengelola keuangan daerah secara mandiri dan tidak banyak campur tangan pemerintah pusat. Namun peluang ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk membuktikan kemampuan dalam mengurus anggaran rumah tangganya sendiri.

Beberapa aspek yang muncul sebagai akibat dari munculnya reformasi keuangan daerah yaitu perubahan sistem penganggaran yang dianut dari *traditional budget* menjadi *performance budget* (Halim dan Iqbal, 2012: xii). *Performance budget* menganjurkan anggaran harus disusun dengan penekanan pada pertanggung jawaban tidak hanya *input* tetapi mempertimbangkan *output* dan *outcome*. Artinya bahwa

penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik melalui Pendapatan Asli Daerah.

Selaras dengan tujuan otonomi daerah yaitu menuntun kemandirian suatu daerah sehingga upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai aktifitas operasional pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Menurut Halim dan Iqbal (2012: 27) masalah yang paling besar pasca otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan lemahnya pengelolaan potensi yang ada di daerah. Oleh karena itu perlu adanya manajemen pendapatan sehingga setiap daerah memahami potensi pendapatan yang dimiliki daerah dan dapat memaksimalkan pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dengan menggali sumber daya yang tersedia akan mempengaruhi peningkatan pembangunan daerah. Menurut hasil penelitian Batubara dalam Wenny (2012: 40) mengatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun tidak berarti kemungkinan jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah suda tidak memerlukan dana perimbangan. Dana perimbangan masih diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2007: 123). Kinerja pendapatan daerah dinilai baik apabila realisasi melampaui target anggaran. Namun perlu diidentifikasi lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Hal ini untuk mengetahui lebih lanjut apakah hasil tersebut disebabkan karena *good planing* dan kerja keras pemerintah daerah atau tidak. Menurut Mahmudi (2007: 124) selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

Laporan keuangan Provinsi Gorontalo triwulan 1 tahun 2012 terlihat bahwa adanya surplus anggaran hal ini dikarenakan realisasi anggaran masih dibawah target anggaran. Namun pada realisasi pendapatan masih jauh dari target realisasi walaupun dana perimbangan masih sangat mendominasi pendapatan. Selain itu realisasi penghimpunan pajak mengalami penurunan sebesar 24,65% dari target anggaran 2012 dibandingkan tahun anggarn sebelumnya mencapai 31,48%. Hal ini diduga penyebabnya adalah kebijakan pemerintah untuk membebaskan

Bea Balik Nama Kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan laporan kajian ekonomi regional Provinsi Gorontalo dari tahun 2008 sampai tahun 2012 terlihat kinerja pendapatan asli daerah masih fluktuasi atau belum menentu bahkan mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu sebesar 37,30 Miliar dengan nilai capaian 30,37% dari target anggaran dibandingkan tahun 2010 senilai 130,90 Miliar dengan nilai capaian sebesar 122,58% dari target anggaran walaupun terjadi peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar 39,07 milyar dengan hasil capaian 24,17 %. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi pertumbuhan pendapatan yang kurang sehat (negatif). Menurut Mahmudi (2007: 125) pertumbuhan pendapatan dikatakan positif apabila kecenderungannya (*trend*) meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memformulasikan suatu kajian ilmiah melalui judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada pemerintah Provinsi Gorontalo*"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah adalah menurunnya tingkat kinerja Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan pendapatan negatif Provinsi Gorontalo dari tahun anggaran 2008 sampai 2012 walaupun terlihat adanya surplus anggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah adalah apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah:

1) Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan pengetahuan akuntansi khususnya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

2) Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pencapaian target anggaran Pendapatan Asli daerah.